

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan usaha pemerintah dan segenap lapisan masyarakat yang ditujukan guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pembangunan menghasilkan manfaat disegala bidang kehidupan namun disamping membuahakan manfaat, pembangunan akan menyebabkan timbulnya perubahan terhadap lingkungan, sumber daya alam maupun perubahan sosial masyarakat. Selain itu Soemarwoto (1989, hlm. 146) mengemukakan bahwa:

“Pembangunan dan lingkungan hidup terjalin dalam interaksi yang tak mungkin dapat dipisahkan. Untuk menjaga dan meningkatkan keserasian hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup, maka pembangunan harus didasarkan pula pada konsep-konsep ekologis. Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Firdausi ( 2006, hlm. 2) Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, terutama dalam membawa hasil produksi dan bahan baku. Perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar perannya dalam pembangunan karena kontribusinya dalam menembus keterisolasian suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan di Indonesia yaitu melalui transportasi darat misalnya pengadaan alat transportasi umum, penambahan rel dan gerbong kereta, dan pengadaan pembangunan jalan tol.

Sedangkan menurut Sumaatmadja (1988, hlm. 9), bahwa pembangunan adalah :

“Pembangunan, baik berkenaan dengan aspek fisik maupun non fisik, tidak dapat dilepaskan dari permukaan bumi sebagai ruang tempat pembangunan itu berlangsung. Pembangunan non fisik seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan lain – lain, sedangkan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, gedung dan lain-lain.”

Selain itu, Sumaatmadja (1988, hlm. 43) juga mengemukakan bahwa ada beberapa landasan geografi yang harus diperhatikan dalam melakukan setiap pembangunan yaitu sebagai berikut :

“Bahwa setiap pembangunan ada beberapa landasan – landasan geografi yang harus diperhatikan sesuai dengan kondisi region setempat, yaitu lokasi, kondisi demografi, prasarana dan saran, potensi sumber daya, sosial budaya setempat, kesuburan tanah, hidrografi dan topografi region masing – masing.”

Kemudian, menurut Sajogyo (1985, hlm. 17) menjelaskan bahwa pembangunan adalah perubahan susunan dan pola masyarakat. Perubahan dalam susunan tersebut akan merangsang lapisan-lapisan masyarakat berproduksi. Dengan perubahan itu juga sarana pembagian dalam masyarakat akan berubah, perataan hasil pembangunan dimantapkan dan teknologi akan menyusul perubahan tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih pesat.

Jalan tol adalah jalan alternative untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh. Jalan tol juga disebut dengan jalan bebas hambatan karena merupakan suatu jalan alternative yang bebas dari kemacetan. Walaupun penggunanya harus rela membayar saat menggunakan jalan tol, kebutuhan akan jalan tol sekarang ini sangat besar karena dapat mempercepat arus orang maupun arus barang. Sebagaimana disebutkan diatas, hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005, yaitu sebagai berikut :

“Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pengguna jalan tol. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.”

Pembangunan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Hal tersebut juga dikemukakan Bertelmus dalam Sumaatmadja (1988, hlm. 25-26), yakni :

“ development is generally accepted to be a process that attempts to the important of living conditions relates to non material want as well as to physical requirement”.

Adanya pembangunan jalan tol ini akan terjadi perubahan kondisi ekonomi dan sosial penduduk. Seperti yang dikatakan Soediono (1985, hlm. 17) yaitu :

“Pembangunan merupakan perubahan susunan dan pola masyarakat yang akan merangsang lapisan-lapisan masyarakat dan dengan adanya teknologi maka pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat”

Masyarakat yang lahannya dibebaskan kemungkinan pendapatannya menurun apabila sumber mata pencahariannya berasal dari lahan pertanian. Di Kecamatan Tanjungsari sebagian besar lahannya berupa pertanian sehingga banyak lahan milik masyarakat yang terpaksa dibebaskan padahal lahan tersebut adalah sumber pendapatan mereka.

Sedangkan masyarakat yang lahannya berupa pemukiman terpaksa pindah ke tempat lain sehingga kegiatan yang dulu sering dilakukan bersama-sama masyarakat sekitar sekarang sudah tidak dapat dilakukan.

Menurut situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pembangunan proyek tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) merupakan bagian dari program mega proyek tol Trans Java yang bertujuan untuk mempercepat sarana transportasi, perkembangan industri pariwisata, menunjang pertumbuhan dan percepatan proses ekonomi yang kerap terhambat karena kendala transportasi, mengurangi kemacetan akibat pasar tumpah, pasar tradisional, penyempitan jalan, jembatan rusak, jalan yang berlubang dan lain-lain adalah hal yang menghambat proses ekonomi secara merata dan cepat seperti dilansir situs resmi Sumedangkab.go.id.

Menurut situs resmi Sumedangkab.go.id terdapat keterangan mengenai Jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) ini akan mengakses ke Bandara Internasional Jawa Barat yang akan di bangun di Kertajati Kabupaten Majalengka. Rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi –Sumedang –Dawuan) direncanakan sepanjang 60,11 Km sebagai upaya Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat untuk pengembangan wilayah Jawa Barat bagian tengah dan timur, khususnya mendukung PKN Cirebon (Wilayah Jawa Barat bagian Tengah dan Timur , rencana pembangunan Pelabuhan Cirebon dan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka), terbagi dalam 6 (enam) seksi yaitu :

Berdasarkan rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2012 dari situs resmi Sumedangkab.go.id, pekerjaan fisik pembuatan tol Cisumdawu sepanjang 60,1 kilometer ini dibagi dalam beberapa tahap. Seksi I adalah Cileunyi-Rancakalong (9,80 kilometer); seksi II Rancakalong-Sumedang Kota (17,51 kilometer); seksi III Sumedang Kota-Cimalaka (3,73 kilometer); seksi IV Cimalaka-Legok (6,96 kilometer); seksi V Legok-Ujungjaya (16,35 kilometer), dan seksi VI Ujungjaya-Dawuan (4,00 kilometer). Kebutuhan lahan untuk tol Cisumdawu dengan asumsi lebar ruang milik jalan (rumija)  $\pm 60$ m dan panjang  $\pm 60,11$  km adalah : 360,60 ha, dimana kondisi lahan yang terlewati Tol Cisumdawu adalah sebagian besar berupa lahan tegalan/kebun/sawah dan sebagian kecil perkampungan.

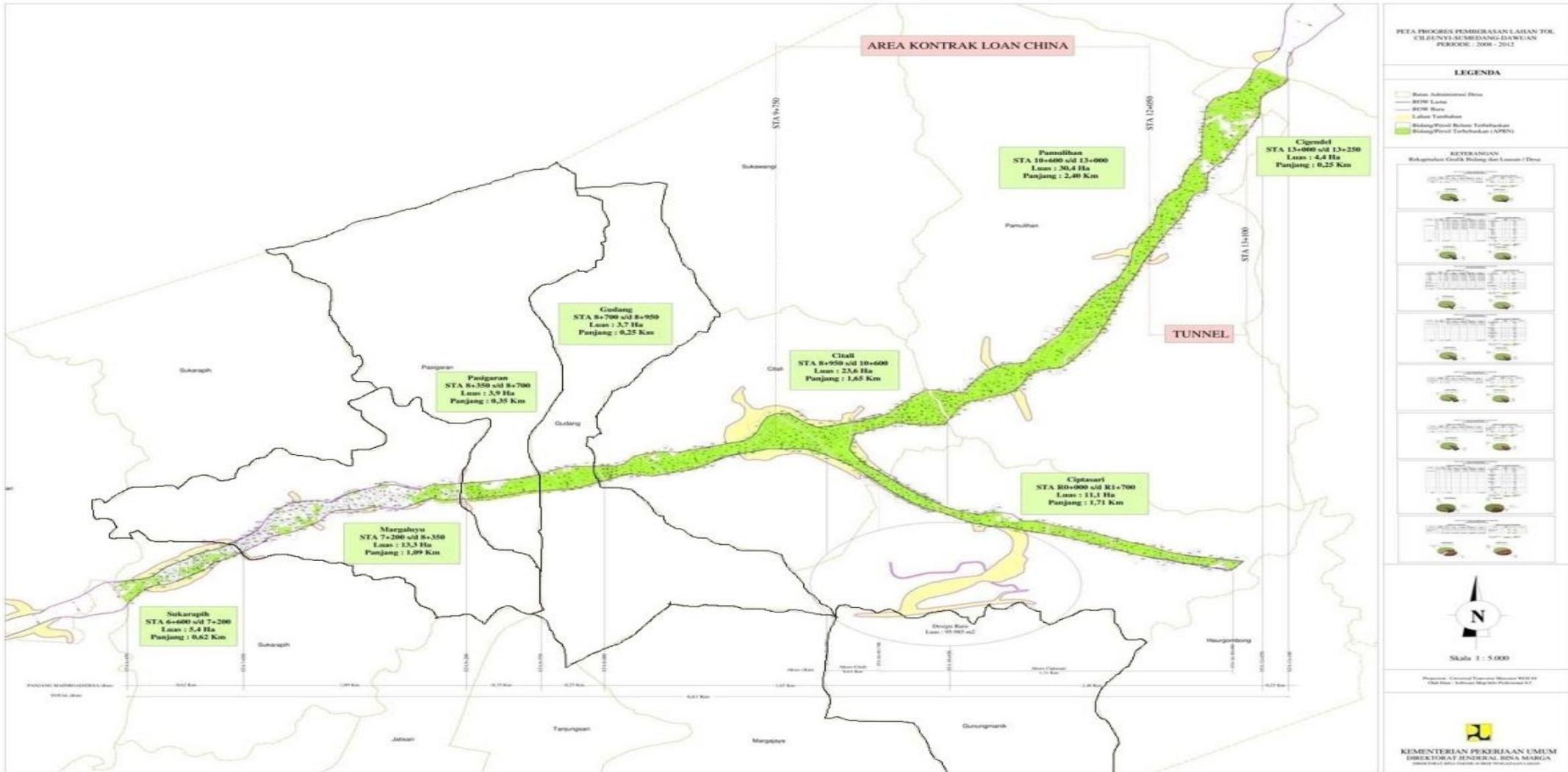
Menurut Abdurachmat dan Maryani (1997, hlm. 29) mengungkapkan pula bahwa lingkup dari studi geografi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Mempelajari perkembangan industri serta faktor – faktor yang mempengaruhinya.
2. Studi tentang bahan mentah yang digunakannya, baik yang mencakup jumlah dan macamnya, maupun sumbernya.
3. Studi tentang penyebaran hasil – hasil industri yang tidak lepas dari masalah transportasi dan pemasaran.

Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan bertujuan untuk menghubungkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi industri. Dengan terwujudnya jalan tol tersebut akan mempercepat laju perputaran ekonomi, dikarenakan jalan tol tersebut akan berujung di salah satu mega proyek lainnya seperti pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

Gambar 1.1

PETA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG - DAWUAN



Monhammad Amran Indra Kusuma, 2016  
Kesiapan Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Peta Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan yang memiliki skala 1 : 3.000 terdapat 4 Desa yang terlewati oleh Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan di Kecamatan Tanjungsari yaitu Desa Margaluyu, Desa Pasigaran, Desa Gudang dan Desa Gunungmanik.

Terdapat 2 bidang tanah yang terbebaskan dan belum terbebaskan. Bidang yang berwarna hijau merupakan bidang tanah yang sudah terbebaskan. Sedangkan bidang tanah yang berwarna putih merupakan bidang tanah yang belum terbebaskan. Berdasarkan fakta di lapangan dan Tabel 1.1 , banyak masyarakat yang tidak sepakat dengan harga ganti rugi dari pemerintah.

**Tabel 1.1**  
**Data Progress Pengadaan Tanah Jalan Tol Cisumdawu 2014**

Wilayah	Komponen	Jumlah Bidang		Jumlah Luas awal (m <sup>2</sup> )	Tambah Luas (m <sup>2</sup> )
		Terbayar	Belum terbayar		
<i>Seksi I</i>					
<b>Kecamatan Tanjung Sari</b>					
<b>a. Desa Margaluyu</b>	Tanah Masyarakat	164	119	133.213	
	Tanah Wakaf	-	3		
	Aset BUMN	-	1		
	Aset Desa	-	8		
	Aset Kabupaten / Pemda	-	3		
<b>b. Desa Pasigaran</b>	Tanah Masyarakat	61	4	39.545	
	Aset Desa	-	2		
	Aset Kabupaten	-	1		
<b>c. Desa Gudang</b>	Tanah Masyarakat	40	-	36.418	1.100
	Aset Desa	-	3		

*Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Kabupaten Sumedang 2014.*

Kecamatan Tanjungsari merupakan salah satu kecamatan yang dilalui pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan dan merupakan daerah Pembebasan lahan mega proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Desa Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, hingga Jumat (4/10), masih terhambat. Pasalnya, belum ada kesepakatan harga tanah antara pemilik lahan dengan pengelola proyek. Selain di Desa Margaluyu, kondisi yang sama

terjadi di Desa Gudang dan Pasigaran. Lahan di sana pun belum dibebaskan karena belum ada kesepakatan mengenai harga tanah seperti dilansir di Proyek Cisumdawu Terhambat – Klik-Galamedia.com.

Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Kabupaten Sumedang tahun 2014, Permasalahan yang terjadi pada aset pemerintah terdapat Desa Margaluyu, Desa Pasigaran, dan Desa Gudang. Pemerintah desa tidak memiliki bukti kepemilikan atas aset desa berupa jalan dan saluran sehingga proses ganti rugi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian masyarakat memiliki kecurigaan terhadap aparat desa dengan anggapan aset desa (jalan dan saluran) sudah dibayar oleh pemerintah. Sedangkan setiap kepala desa meminta rekomendasi dari P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kabupaten Sumedang yang menjelaskan bahwa untuk aset desa berupa jalan dan saluran saat ini belum dilakukan pembayaran ganti ruginya.

Permasalahan yang terakhir yaitu tanah wakaf terdapat Desa Margaluyu dan Desa Pasigaran yang membahas mekanisme pembayaran UGR untuk tanah wakaf harus mendapat izin dari Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, Nadzir harus menyiapkan persyaratan administrasi dan di konsultasikan ke kantor agama di kabupaten sampai ke tingkat kantor agama wilayah propinsi sebelum dikirim ke kantor kementerian agama menurut Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Kabupaten Sumedang tahun 2014.

Dalam Pasal 1 Angka 11 Perpres No.36 Tahun 2005 dan Perpres No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No.36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dijelaskan, ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Dari penjelasan tersebut bahwa masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Apabila nilai lahan yang

**Mohammad Amran Indra Kusuma, 2016**

***Kesiapan Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terkena pembebasan lahan itu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan pemerintah. Namun, fakta dilapangannya masih terdapat masyarakat yang tetap bertempat tinggal di tanah yang akan digunakan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan.

Oleh karena itu, dengan melihat gambaran umum yang telah dipaparkan, maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang bagaimana pengetahuan, sikap dan respon masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Tanjungsari yang dilalui pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan. Untuk itu, penulis mengambil judul **“KESIAPAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG – DAWUAN DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG”**

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Pembangunan infrastruktur jalan dapat memajukan dan mendukung sektor ekonomi. Namun pembangunan tersebut dapat merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perubahan tata guna lahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rencana pembangunan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan ?
2. Bagaimana kesiapan masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi rencana pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan.
2. Untuk mengidentifikasi kesiapan masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis : secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu geografi. Serta

sebagai bahan pembelajaran geografi disekolah, khususnya yang berhubungan dengan pola-pola keruangan dan proses yang berkaitan serta mengenai perencanaan pembangunan wilayah.

2. Manfaat Praktis : secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya pemerintah daerah setempat untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan di Kecamatan Tanjungsari. Serta bagi pengelola infrastruktur, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai kebijakan – kebijakan yang efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan ke ikutsertaan masyarakat dalam pembangunan jalan tol di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.